

TESIS
PERUBAHAN SANKSI *ILLEGAL FISHING*
MENURUT PASAL 93 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PERIKANAN
PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA



OLEH:
STEPPANUS MEKY CRESIAWAN, SH
NIM. 032014153002

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

**PERUBAHAN SANKSI *ILLEGAL FISHING*
MENURUT PASAL 93 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PERIKANAN
PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

OLEH:

**STEPPANUS MEKY CRESIAWAN, SH
NIM. 032014153002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

Lembar Pengesahan

Tesis ini telah disetujui
Tanggal 15 Agustus 2022

Oleh
Dosen Pembimbing Utama



Dr. Astutik, S.H., M.H

NIP. 196803031992032002

Dosen Pembimbing Kedua

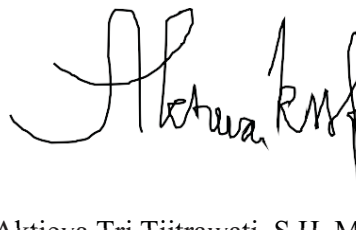


Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 196209081987012001

Mengetahui

Koordinator Program Studi magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196401071989032001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal 15 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M. Hum.

Anggota : 1. Dr. Dina Sunyowati, S.H., M. Hum.

2. Prof. Koesrianti, S.H., M. Hum.

3. Dr. Astutik, S.H., M.H

4. Riza Alfianto Kurniawan, S.H., MTCP

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Perubahan Sanksi *Illegal Fishing* menurut Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja. Permasalahan atau rumusan masalah penelitian ini adalah Dasar pertimbangan dirubahnya sanksi pidana menjadi sanksi administrasi bagi pelaku *illegal fishing* dalam Undang Undang Cipta Kerja dan Implikasi perubahan sanksi bagi pelaku *illegal fishing* dalam Undang Undang Cipta Kerja terhadap penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yakni penelitian dengan menggunakan bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Undang Undang Cipta Kerja khususnya dalam ketantuan Pasal 93 ayat (2) berdampak pada penegakan hukum khususnya oleh TNI AL. Terhadap tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) tidak bisa dilakukan secara optimal dan tegas yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran ataupun tindak pidana perikanan. Dengan adanya perubahan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) tersebut tidak menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelaku tindak pidana perikanan khususnya bagi warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kata kunci: UU Cipta Kerja, illegal fishing.

ABSTRACT

This study discusses the Amendment to Illegal Fishing Sanctions according to Article 93 Paragraph (2) of the Fisheries Law after the Enforcement of the Job Creation Act. The problem or formulation of the research problem is the basis for consideration of changing criminal sanctions into administrative sanctions for illegal fishing actors in the Job Creation Act and the implications of changing sanctions for illegal fishing actors in the Job Creation Act on law enforcement in the Indonesian Exclusive Economic Zone. This research method is legal research, namely research using legal materials to solve legal facts or problems and to obtain legal materials and analyze them through legislation. Sources of legal materials used are primary and secondary legal data sources. The results of the study indicate that the enactment of the Job Creation Act, especially in the provisions of Article 93 paragraph (2), has an impact on law enforcement, especially by the Navy. Against fisheries crime (illegal fishing) it cannot be carried out optimally and decisively which can prevent violations or fisheries crimes. With the change in the provisions in Article 93 paragraph (2), it does not cause a deterrent effect for perpetrators of fisheries crimes, especially for foreign nationals in the Indonesian Exclusive Economic Zone.

Keywords: Job Creation Law, illegal fishing.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini Saya :

Nama : Steppanus Meky Cresiawan

NIM : 032014153002

Alamat : Perumahan Wilis Indah II Jl. I 2 No. 21 RT 1 RW 7 Desa
Pojok Kec Mojoroto Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis Saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan Saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga maupun diperguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 15 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Steppanus Meky Cresiawan

NIM 032014153002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia Nya, sehingga Saya dapat menyelesaikan Tesis sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum pada program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Airlangga. Tak lupa Saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, SH, MH, LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Arlangga.
2. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati , S.H., M,Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum.
3. Dr. Astutik, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Tesis yang telah bersabar dan telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga terselesaikannya tesis ini.
4. Prof. Koesrianti, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing II Tesis yang telah bersabar dan telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga terselesaikannya tesis ini.
5. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Program Studi Magister Hukum.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan Saya kesempatan untuk menempa ilmu dan mendapatkan pembelajaran serta menyelesaikan masa studi Saya;

7. Orang tuaku, istri dan anak-anakku yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan studi Saya.
8. Letkol Laut (KH) Yopy Riri, S.H. M.H selaku Kepala Dinas Hukum Koarmada II Surabaya yang telah memberikan ijin penelitian dan arahnya sehingga terselesaikannya Tesis ini.
9. Rekan-Rekan kerja Dinas Hukum Koarmada II Surabaya yang selalu memberikan doa dan dukungan.
10. Teman-teman kuliah Magister Ilmu Hukum Angkatan 2020/2021 Universitas Airlangga Surabaya terima kasih atas dorongan semangatnya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah Penulis terima dari banyak orang yang mendukung terselesaikannya jalan yang Penulis tempuh dengan penuh perjuangan suka dan duka ini mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pula penulisan Tesis ini dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi Para Pembaca yang membacanya.

Surabaya, 15 Agustus 2022

STEPPANUS MEKY CRESIAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
LEMBAR PENGESAHAN	ii	
ABSTRAK	iv	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v	
KATA PENGANTAR	vii	
DAFTAR ISI	ix	
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi	
BAB I PENDAHULUAN		
1. Latar Belakang	1	
2. Rumusan Masalah	13	
3. Tujuan Penelitian	13	
4. Manfaat Penelitian	13	
5. Kajian Pustaka	13	
6. Metode Penelitian	35	
7. Sistematika Penulisan	38	
BAB II RATIO LEGIS PERUBAHAN SANKSI PIDANA MENJADI SANKSI ADMINISTRASI DALAM UNDANG UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PASAL 93 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PERIKANAN		40
2.1 Esensi Perubahan Sanksi Pidana menjadi Sanksi Administrasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Perikanan	40	

2.2 Dasar Pertimbangan Kebijakan Perubahan Sanksi Pidana menjadi ...73

Sanksi Administrasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

2.3 Undang-Undang Cipta Kerja setelah Putusan Mahkamah 77

Konstitusi

BAB III IMPLIKASI PERUBAHAN SANKSI BAGI PELAKU *ILLEGAL FISHING* DALAM UNDANG UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENE-
GAKAN HUKUM DI ZEE 80

3.1 Peran TNI AL dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di ZEEI... 85

3.1.1 Tugas dan wewenang Tentara Nasional Indonesia 85

Angkatan Laut

3.1.2 Peran dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Angkatan ... 90

Laut

3.2 Akibat Hukum Perubahan Sanksi Pidana menjadi Sanksi 95

Administratif

3.2.1 Akibat Hukum Bagi Pelaku *Illegal Fishing* 95

3.2.2 Akibat Hukum Penanganan Tindak Pidana *Illegal Fishing* 99

BAB IV PENUTUP 111

4.1 Kesimpulan 111

4.2 Saran 111

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) 1982, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.
- Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731.